



PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB

JL. AHMAD YANI NO. 89 BREBES

Telp/Fax: (0283) 971006 – 761674

Website : www.pn-brebes.go.id

Brebes, 8 Januari 2020

Nomor : W12.U11/ 86 /OT.01.2/1/2020
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengiriman Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Tahun 2019

Kepada Yth :

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG R.I.

Melalui Yth :

IBU KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH

di –

SEMARANG

Sehubungan dengan surat dari Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor W12.U/ 09 /OT.01/2/1/2020 Tanggal 3 Januari 2020 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dan surat dari Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor 1730/SEK.OT.2.12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, maka dengan hormat kami sampaikan berkas Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Kantor Pengadilan Negeri Brebes sebagaimana tersebut dalam berkas yang kami kirimkan.

Atas perhatiannya kami haturkan terima kasih.

KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES



EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H
NIP. 19670612 199403 1 007

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2019
PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS IB



PENGADILAN NEGERI BREBES KELAS 1B
Alamat : Jl. Ahmad Yani No. 89 Brebes, 52212
Telp : (0283) 671006 – 671796 Fax. 671674
Web: <http://www.pn-brebes.go.id>
Email : pn.brebes@yahoo.com

PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Brebes ini selesai disusun. Maksud dan tujuan dari laporan ini sebagai hasil akhir dari aktualisasi program Pengadilan Negeri Brebes selama tahun 2019 dan perencanaan dari program kerja Pengadilan Negeri Brebes pada Tahun 2019. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga disusun untuk memenuhi Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1730/SEK/OT.01.2/12/2019, tanggal 16 Desember 2019, perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 dan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : W12.U/09/OT.01.2/1/2020, tanggal 3 Januari 2020, perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung RI Tahun 2019.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Brebes tahun 2019 ini merupakan gambaran mengenai kebijakan umum, visi dan misi, serta rencana strategis Pengadilan Negeri Brebes. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga merupakan gambaran mengenai struktur organisasi, SOP (Standar Operasional Prosedur) dan kinerja atau SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) Pengadilan Negeri Brebes. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga merupakan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengelolaan pada tahun 2019 yang meliputi : pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keadaan perkara, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, dukungan teknologi informasi dan regulasi pada tahun 2019. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga merupakan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan pengawasan internal dan evaluasi pada tahun 2019. Selain itu, Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini juga menyajikan tentang kesimpulan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran Pengadilan Negeri Brebes selama tahun 2019 dan rekomendasi pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang.

Dengan adanya Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini, diharapkan bisa memberikan informasi mengenai tentang kinerja Pengadilan Negeri Brebes. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna penyempurnaan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Brebes ke depan dan guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas, fungsi, peran dan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Negeri Brebes di masa yang akan datang.

Brebes, 8 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BREBES

EDI SAPUTRA PELAWI, S.H., M.H
NIP. 196706121964031007

DAFTAR ISI


Halaman Judul	i
Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar.....	viii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Kebijakan Umum Peradilan.....	1
1.2. Keterbukaan Informasi	2
1.3. Visi dan Misi	3
1.4. Rencana Strategis (Renstra).....	3
BAB II Keadaan Perkara	10
2.1. Keadaan Perkara Pada Pengadilan Negeri Brebes	10
2.1.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Brebes pada Kepaniteraan Pidana Tahun 2019..	10
2.1.2. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Brebes pada Kepaniteraan Pidana Tahun 2019.	12
2.2. Penyelesaian Perkara Pada Pengadilan Negeri Brebes.....	13
2.2.1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus	13
2.2.2. Jumlah Perkara Yang Diputus Teapat Waktu	27
2.2.3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK.....	28
2.2.4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	32
2.2.5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil melalui Diversi	32
2.3. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	34
2.3.1. Posbakum	35
2.3.2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.....	35
2.3.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	35
BAB III Sumber Daya Manusia.....	38
3.1. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan / Golongan / Pendidikan	38
3.1.1. Mutasi.....	41
3.1.2. Promosi	42
3.1.3. Pensiun	42

3.1.4	Diklat	42
BAB IV	43
4.1.	Pengelola Keuangan, Sarana dan Prasarana, Teknologi Informasi	43
4.1.1.	Pengelola Keuangan	43
4.1.2	Sarana dan Prasarana	44
4.1.3.	Pengelolaan Teknologi Informasi	44
4.1.3.1.	Implementasi e-court di lingkungan Peradilan Umum	45
4.1.3.2.	Implementasi SIPP di lingkungan Peradilan Umum	47
BAB V	Peningkatan Pelayanan Publik	49
5.1.	Akreditasi Penjamin Mutu.....	49
5.2.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	50
5.3.	Inovasi Pelayanan Publik	52
BAB VI	Pengawasan	54
6.1.	Internal	55
6.2.	Evaluasi.....	56
BAB VII	Penutup	57
7.1.	Kesimpulan	57
7.2.	Rekomendasi	57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekapitulasi Perkara Diputus Pada Pengadilan Negeri Brebes Tahun 2019	13
Tabel 2.	Perkara Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 yang Diputus Tahun 2019	13
Tabel 3.	Perkara Sisa Perkara Perdata Tahun 2018 yang Diputus Tahun 2019	13
Tabel 4.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Biasa Per Bulan Tahun 2019.	14
Tabel 5.	Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Biasa Tahun 2019.....	15
Tabel 6.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Khusus Anak Per Bulan Tahun 2019.....	15
Tabel 7.	Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2019.....	16
Tabel 8.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Singkat Per Bulan Tahun 2019	16
Tabel 9.	Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Singkat Tahun 2019.....	17
Tabel 10.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Cepat Per Bulan Tahun 2019	18
Tabel 11.	Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Cepat Tahun 2019.....	18
Tabel 12.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Lalu Lintas Per Bulan Tahun 2019.....	19
Tabel 13.	Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Lalu Lintas Tahun 2019.....	20
Tabel 14.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Praperadilan Per Bulan Tahun 2019.....	20
Tabel 15.	Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Praperadilan Tahun 2019	21
Tabel 16.	Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019	21
Tabel 17.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Permohonan Per Bulan Tahun 2019.....	22
Tabel 18.	Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2019.....	23
Tabel 19.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Gugatan Per Bulan Tahun 2019.....	24
Tabel 20.	Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2019.....	25

Tabel 21. Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Per Bulan Tahun 2019.....	25
Tabel 22. Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2019.....	26
Tabel 23. Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2019.....	27
Tabel 24. Rekapitulasi Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019.....	27
Tabel 25. Rekapitulasi Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2019.....	28
Tabel 26. Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa yang mengajukan Upaya Hukum tahun 2019.....	28
Tabel 27. Rekapitulasi perkara pidana yang mengajukan upaya hukum Perjenis / Klasifikasi Perkara Tahun 2019	29
Tabel 28. Rekapitulasi perkara perdata yang mengajukan upaya hukum tahun 2019.....	29
Tabel 29. Rekapitulasi perkara perdata yang mengajukan upaya hukum perjenis / klasifikasi perkara tahun 2019.....	29
Tabel 30. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2019 ..	30
Tabel 31. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019	31
Tabel 32. Upaya yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2019.....	31
Tabel 33. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2019 ..	31
Tabel 34. Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi Tahun 2019...	32
Tabel 35. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2019.....	32
Tabel 36. Perkara pidana khusus anak yang berhasil melalui Diversi Tahun 2019.....	33
Tabel 37. Rekapitulasi Perkara Pidana Yang Mengajukan Grasi Tahun 2019 ...	33
Tabel 38. Rekapitulasi Perkara Perdata Yang Mengajukan Permohonan Eksekusi	33
Tabel 39. Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	38
Tabel 40. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Brebes Tahun 2019.....	39
Tabel 41. Jumlah Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Brebes Berdasarkan Jabatan Tahun 2019.....	39
Tabel 42. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Brebes Tahun 2019	40
Tabel 43. Jumlah Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Pengadilan	



Negeri Brebes Berdasarkan Jabatan Tahun 2019	41
Tabel 44. Daftar Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Brebes Tahun 2019	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Grafik Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Biasa Perbulan Tahun 2019	14
Gambar 2.	Grafik Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Khusus Anak Per bulan Tahun 2019	16
Gambar 3.	Grafik Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Singkat Per bulan Tahun 2019	17
Gambar 4.	Grafik Rekapitulasi Keadaan Pidana Cepat Per Bulan Tahun 2019	18
Gambar 5.	Grafik Rekapitulasi Keadaan Pidana Lalu Lintas Per Bulan Tahun 2019	19
Gambar 6.	Grafik Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Praperadilan Per Bulan Tahun 2019	21
Gambar 7.	Grafik Rekapitulasi Keadaan Perdata Permohonan Per Bulan Tahun 2019	23
Gambar 8.	Rekapitulasi Keadaan Perdata Gugatan Per Bulan Tahun 2019	24
Gambar 9.	Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Per Bulan Tahun 2019	26
Gambar 10.	Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu	34
Gambar 11	Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Negeri Brebes	51

BAB I

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B sebagai Peradilan Tingkat Pertama yang dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana tersebut dalam pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945 yang dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya dibawah naungan dan bimbingan serta pengawasan Mahkamah Agung R.I berkewajiban melaksanakan amanat yang digariskan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang mengacu pada arah kebijaksanaan hukum dan Garis Besar Haluan Negara.

1.1. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Pada era reformasi lembaga peradilan dituntut lebih transparan dan profesional dibidang hukum, dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan dimata masyarakat umum tidak lagi menakutkan, akan tetapi menjadikan pelindung dan pengayom masyarakat dalam mencari keadilan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Brebes telah melaksanakan serangkaian kebijakan yang merupakan upaya tindak lanjut dari kebijakan umum yang telah dicanangkan dan diperintahkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Brebes mempunyai tugas pokok adalah sebagai berikut :

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan baik perkara pidana dan perdata.
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum
3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah daerah Kabupaten Brebes, apabila diminta, dan melaksanakan tugas serta kewenangan lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Adapun Pengadilan Negeri Brebes mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Sebagai pelayan hukum masyarakat pencari keadilan, pada umumnya mengenai berbagai perkara atau sengketa.
2. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan, pada umumnya di wilayah hukum Kabupaten Brebes.
3. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

1.2. KETERBUKAAN INFORMASI

Pengadilan Negeri Brebes pada tahun 2019 masih terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2019 tersebut meliputi :

1. Adanya website Pengadilan Negeri Brebes yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang prosedur dan alur proses perkara sejak perkara didaftarkan / diterima, diperiksa dan diputus serta penyelesaian minutasinya.
2. Adanya program SMS *Gateway* Tilang, yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat / pelanggar tindak pidana lalu lintas memperoleh informasi tentang putusan denda yang dijatuhkan oleh Pengadilan.
3. Adanya sarana *Teleconference* yang berfungsi untuk membantu saksi dalam persidangan anak apabila saksi mengalami trauma apabila bertemu dengan Terdakwa ;
4. Adanya Sarana Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang optimal dan transparan.
5. Adanya aplikasi PTSP dalam pengelolaan surat masuk dan surat keluar pada Pengadilan Negeri Brebes.
6. Adanya aplikasi e-Court yang merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan secara elektronik melalui email yang terdaftar di E-Court.
7. Adanya Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Kelas IB Brebes.
8. Adanya aplikasi Sistem Pengawasan (SIWAS) dapat membantu pengadilan memberikan pelayanan yang akuntabel, transparansi, bebas korupsi di pengadilan, terintegrasi, kerahasiaan, objektif, adil, independen, dan kepastian hukum.
9. Adanya aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang mana semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (*paper based*).

Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di daerah dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh Pemerintah dan pengaruh-pengaruh kekuasaan lainnya, sehingga cita-cita Negara hukum yang menjamin penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dapat terwujud.

Dalam menjalankan suatu organisasi yang baik, terlebih dahulu ditentukan apa yang akan menjadi visi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut harus menentukan beberapa misi yang merupakan pernyataan untuk menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung RI, maka dalam merumuskan visi dan misi tersebut, Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B senantiasa menyelaraskan visi dan misi Mahkamah Agung RI yaitu terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, dengan misi menjaga kemandirian Badan Peradilan, memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

1.3. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Brebes. Visi Pengadilan Negeri Brebes mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Brebes mengacu pada Misi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

1.4. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Berdasarkan TAP MPR Nomor X/MPR/2001 dan seiring dengan langkah-langkah kebijakan Mahkamah Agung R.I, di tahun 2015 Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B telah melaksanakan upaya-upaya :

1. Peningkatan Kinerja Dalam Penegakkan Hukum ;

Dalam rangka peningkatan kinerja dalam penegakan hukum ini Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B dalam tahun 2019 berusaha untuk mengikutsertakan Hakim, Panitera, Panitera Pengganti, Pejabat Struktural, Juru Sita/Juru Sita Pengganti dan Staf dalam kegiatan-kegiatan Pendidikan/Pelatihan, Sosialisasi dan Penataran, baik yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi maupun oleh Badan/Lembaga lainnya. Hal ini guna menambah wawasan agar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dapat lebih baik lagi.

2. **Penyelesaian Perkara ;**

Pada tahun 2019 upaya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Brebes terus-menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat pertama paling lambat 5 bulan. Untuk mendukung tercapainya percepatan penanganan perkara di Pengadilan Negeri Brebes pada Tahun 2019 Ketua Pengadilan Negeri Brebes mengeluarkan kebijakan yaitu:

1. Mengimplementasikan “*One Day Minutation*” sebagai langkah agar prosentase SIPP Pengadilan Negeri Brebes pada Peta SIPP Mahkamah Agung bisa hijau, yaitu diatas 90%.
2. Memastikan kesiapan konsep putusan dan berita acara sebelum putusan dibacakan.
3. Optimaliasi pelaksanaan sidang sesuai jadwal yang ditentukan dalam *court calendar*.
4. Meningkatkan kepatuhan pegawai dalam pengisian data dan dokumen pada SIPP.
5. Mengimplementasikan administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*).
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui Meja PTSP

3. **Manajemen Perkara ;**

Manajemen perkara di lingkungan peradilan telah diwujudkan dengan dibangunnya *case management system*. Lingkungan peradilan umum menggunakan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh mahkamah Agung RI. Di tahun 2019, manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan antara lain:

SIPP Versi 3.2.0-1

1. Perbaikan Jumlah Panjar Perkara Yang Hampir Habis (Kurang dari Rp100.000) pada dashboard.
2. Perbaikan tanggal penetapan tidak tampil.
3. Perbaikan slide sidang.
4. Perbaikan cetak template dan penamaan file download pada semua browser.
5. Perbaikan delegasi perdata permohonan.
6. Perbaikan BAS lanjutan pemeriksaan saksi adecharge.
7. Perbaikan tombol unduh dokumen BAS.
8. Perbaikan query saat tambah/edit Tanggal Penetapan pada mediasi tahap verzet.
9. Perbaikan tab mediasi.
10. Perbaikan Template BAS (Perceraian).
11. Perbaikan input Mediasi dan Putusan.

12. Perbaiki format date RFC3339 untuk cek delegasi pada semua browser.
13. Perbaiki Ruang sidang dan pencarian.
14. Perbaiki Data Relas Status Pihak Para Saksi.
15. Perbaiki tanggal PHS pada relas pertama.
16. Perbaiki status Perkara Yang Belum Pengiriman Berkas Kasasi Gugatan terlambat yang TMSF/dicabut.
17. Perbaiki posita pada data umum.
18. Perbaiki jumlah uang pada Cetak instrumen relas.
19. Perbaiki Jurnal Keuangan Banding.
20. Perbaiki proses input perkara lalu-lintas.
21. Perbaiki tampilan link pada data umum.
22. Perbaiki cetak template jurnal transaksi harian.
23. Biaya Panjar Perkara.
24. Redaksi Judul Tempate pada seluruh kategori transaksi.
25. Perbaiki Popup Cetak Jurnal Transaksi.
26. Perbaiki Cetak template jurnal transaksi harian semua transaksi.
27. Perbaiki Cetak Status Jurusita pada penunjukan jurusita.
28. Perbaiki Template Tanda Terima Akta Cerai.
29. Perbaiki autocomplate nomor perkara pada delegasi dan upaya hukum.
30. Perbaiki Template Pendukung.
31. Perbaiki Tab jadwal sidang.
32. Perbaiki Javascript validasi Tanggal pada surat pengantar.
33. Perbaiki template putusan dan BHT.
34. Perbaiki URL alamat SIPP PN agar lebih dinamis dan mendukung perubahan PORT HTTP.
35. Perbaiki upaya hukum utk badan hukum.
36. Perbaiki tampilan untuk pilihan tidak berwenang dan terdakwa meninggal.
37. Perbaiki tampilan cabut perkara.
38. Perbaiki Cabut Perkara, Pengalihan Pemeriksaan Ke Perkara Anak, Tidak Berwenang, Terdakwa meninggal pada semua browser.
39. Perbaiki Tab Putusan Sela.
40. Perbaiki Template PHS.
41. Perbaiki pilihan DATA Pihak Intervensi.
42. Perbaiki Template Penetapan Persiapan.
43. Perbaiki Tambah Saksi.
44. Perbaiki Tanggal Putusan pada perkara Perlawanan ditolak.
45. Perbaiki pilihan amar sesuai jenis perkara.
46. Perbaiki template BA.
47. Perbaiki DATA Umum.
48. Perbaiki template Penetapan Pemeriksaan Persiapan.
49. Perbaiki riwayat perkara.

50. Perbaikan penunjukan kembali PP.
51. Perbaikan template penetapan mediator.
52. Perbaikan Cetak template PMH.
53. Perbaikan Penambahan mediasi.
54. Perbaikan template BAS Lanjutan pemeriksaan terdakwa.
55. Perbaikan warning 14 hari utk permohonan PK.
56. Perbaikan rekonvensi.
57. Perbaikan cabut perkara.
58. Perbaikan DATA DOUBLE di LIST perkara perdata atau di LIST daftar perkara indikator (karena perkara mediasi).
59. Perbaikan DATA dan template penahanan peradilan umum.
60. Perbaikan jurnal eksekusi perkara GS tidak muncul.
61. Perbaikan Template penetapan praperadilan.
62. Perbaikan Perkara Tilang tidak muncul PHS.
63. Link Edit Putusan Banding bisa diakses oleh user Ketua/Wakil Ketua (Bila menambahkan data putusan Banding perkara lama).

SIPP Versi 3.2.0-2

1. Tambah Pihak Intervensi bisa diakses oleh PP yang bersangkutan.
2. Perbaikan Jurnal Gugatan Sederhana.
3. Perbaikan import tilang tampil error dan PHS.
4. Perbaikan Mediasi. Perbaikan Mediasi.
5. Penambahan tunda Pukul pada BAS Perdata Umum.
6. Perbaikan validasi tanggal.
7. Perbaikan Penetapan Hari Sidang Ganda.

SIPP Versi 3.2.0-3

1. Penambahan Klasifikasi perkara Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).
2. Perbaikan Pihak Intervensi untuk permohonan PK.
3. Penambahan Input Jurusita pada Jurnal.
4. Perbaikan Template Perpanjangan Penahanan Pidana Perikanan dan HAM
5. Penambahan News Ticker Berita MA / Badilum pada jadwal sidang dan perbaikan scroll pada badilum.
6. Perbaikan status perkara di dashboard utk GS cabut sebelum PMH masih muncul
7. Perbaikan klasifikasi perkara lain-lain pada pidana singkat dan cepat yang berubah menjadi Pid.Sus
8. Perbaikan klasifikasi perkara Keberatan atas ganti kerugian pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tdk muncul tombol putusan akhir karena tanpa mediasi.
9. Penambahan Fitur Saldo Awal Pada Jurnal Harian.
10. Perbaikan Konvert file word ke pdf untuk antrian dirput.

11. Perbaikan Default Penggugat 1 yang membayar pada jurnal.
12. Perbaikan detil banding utk validasi tanggal.
13. Penambahan kehadiran pihak di persidangan PU tdk bisa menghadirkan terdakwa secara otomatis memunculkan tombol link putusan akhir.
14. Penambahan Pilihan Jurusita di jurnal.
15. Perbaikan Upload Edoc Putusan Verzet.
16. Perbaikan template untuk pihak dengan kewarganegaraan selain indonesia.
17. Perbaikan sebutan para pihak di jadwal sidang.
18. Perbaikan template untuk pihak dengan kewarganegaraan selain indonesia.
19. Penambahan kehadiran pihak pada jadwal sidang untuk pihak intervensi
20. Penambahan opsi pilih semua pihak saat menambahkan pengacara.
21. Penambahan Fitur Court Calender.
22. Perbaikan Cabut Praperadilan.
23. Perbaikan Upload file putusan GS dan Verzet.
24. *Update File Synchron* ke MA job.xml.

SIPP Versi 3.2.0-5

1. Perbaikan nama kasir di cetak Jurnal Harian (yg tandatangan kasir yang aktif)
2. Perbaikan Perkara prodeo DIPA defaultnya masih ada transaksi pendaftaran (menurut perma tidak dipungut pendaftaran).
3. Perbaikan tanggal dan nmr resi diwajibkan pada delegasi keluar.
4. Perbaikan nama depan pihak dengan dua suku kata di cetak PBT yang hilang suku nama pertamanya.
5. Perbaikan tidak ada biaya pelaksanaan delegasi utk perkara pidana.
6. Perbaikan kehadiran pihak PARA PIHAK TIDAK HADIR statusnya Data Kehadiran Belum Lengkap
7. Perbaikan Riwayat penahanan pada template perpanjangan penahanan harusnya tidak menampilkan perpanjangan oleh hakim.
8. Perbaikan amar putusan keberatan Gugatan Sederhana error validasi, muncul kurang dari 50 karakter.
9. Perbaikan Saat terdakwa dibebaskan dari penahanan (ditambah data penahanan) counter/jumlah status penahanan yang masa penahanannya habis tidak berkurang, tapi kalo diklik list datanya berkurang (jumlahnya beda dengan counter).
10. Perbaikan jenis perkara : Objek Sengketa Bukan Tanah/Pembatalan Arbitrase, jangka waktu 50 hari tanpa ada mediasi.

11. Perbaikan Amar Putusan Perlawanan dan Amar Putusan Verzet kurang dari 50 karakter padahal sudah diisi lebih dari 50 Karakter.
12. Perbaikan Gugatan Sederhana tidak bisa edit panjar
13. Perbaikan Putusan Verstek Gugatan Sederhana dan putusan verzet Perdata, tampil nya tidak padahal sudah dipilih Ya;
14. Perbaikan pihak publikasi di edit data umum sesuai jenis klasifikasi perkaranya.
15. Perbaikan lama proses mediasi maksimal 60 hari pada reminder.
16. Perbaikan Pilihan panjar perkara PHI tidak muncul saat edit panjar.
17. Perbaikan PK pidana umum, hakim pemeriksa adalah hakim tunggal bukan majelis, dan cetak PMH dan penetapan pemeriksaan error.
18. Perbaikan pada tanggal validasi putusan sela. Sehingga bisa mengisi tanggal putusan sela yang bertepatan dengan tanggal sidang pertama.
19. Perbaikan kolom keterangan pada edit pemberitahuan putusan tidak bisa tersimpan
20. Penambahan Fitur E Court.
21. Perbaikan fitur Court Calender
22. Perbaikan penambahan PK untuk pemohona kedua.
23. Perbaikan tab putusan hilang untuk status putusan gugur pada GS

4. Pemenuhan Sarana dan Prasarana ;

- a) Kendaraan Dinas roda 4 (empat) :
Untuk saat ini pemenuhan kendaraan roda 4 di Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B ada 5 (lima), yang terdiri dari 3 pinjam pakai dari PEMDA Brebes, 1 Hibah dari PEMDA Brebes dan 1 Transfer Masuk dari Mahkamah Agung R.I.
- b) Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) ;
Di Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B untuk tahun 2019 tidak ada penambahan kendaraan bermotor. Untuk saat ini, Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B memiliki 18 unit sepeda motor yang terdiri dari 11 Kendaraan dari Saldo Awal di Tahun 2019 dan 7 dari Mahkamah Agung R.I, dan terdapat 3 kendaran sepeda motor yang rusak berat, maka untuk mendukung kelancaran tugas diharapkan adanya penambahan kendaraan dinas roda dua terutama untuk Pejabat Struktural dan staff yang tugasnya berhubungan dengan instansi lain.

5. Gedung dan Halaman ;

Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B memiliki 7 Rumah Dinas namun yang layak huni sebanyak 2 Unit Rumah Dinas dan yang 5 Unit Rusak Berat. Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B menempati Rumah Dinas MUSPIDA Brebes. Untuk tahun 2019 tidak ada rehabilitasi untuk rumah dinas yang rusak berat. Namun ada penambahan 1 Pos Satpam Hibah dari PEMDA Brebes.

6. Pengadaan Alat Pengolah Data;

Ada penambahan alat pengolah data berupa 4 (empat) unit Laptop, Server, dan Mesin Anjungan untuk mendukung kelancaran tugas Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB di tahun 2019.

7. Pelayanan pada masyarakat.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pencari keadilan, Pengadilan Negeri Brebes telah menggunakan sistem loket yaitu di Kepaniteraan Pidana, Perdata dan Hukum, sedangkan untuk biaya panjar (SKUM) dibayarkan melalui BTN Cabang Pembantu Brebes / menggunakan mesin EDC yang sudah disediakan dan Pembayaran E-Court dibayarkan melalui BTN.

BAB II

2.1. KEADAAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BREBES

Sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku Kedua, proses pemeriksaan perkara Pidana di Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B telah sesuai dengan buku petunjuk pola Bindalmin tersebut yaitu Berkas perkara pidana yang diterima oleh Pengadilan Negeri diterima oleh meja Pertama, diteliti kelengkapannya lalu dilengkapi dengan surat penetapan majelis hakim dan panitera pengganti, untuk perkara pidana biasa langsung bisa diberikan nomer dan register, perkara pidana singkat diberi nomor dan diregistrasi setelah sidang pertama dan untuk perkara cepat serta pelanggaran lalu lintas diberi nomor dan registrasi setelah selesai sidang. Pembagian perkara dilaksanakan dengan tertib begitu juga pelaksanaan dan penundaan sidang dicatat dalam buku register dengan tertib setelah mendapat laporan dari panitera.

Tugas Pokok bidang teknis kepaniteraan perdata adalah menerima berkas perkara perdata yang masuk di Pengadilan Negeri Brebes Kelas 1B baik yang diajukan oleh perseorangan (*in person*) maupun oleh Badan Hukum melalui kuasanya. Tugas-tugas yang diterima di kepaniteraan perdata antara lain perkara permohonan, Perkara Gugatan, Permohonan Banding, Permohonan Kasasi, Permohonan Peninjauan Kembali, permohonan Eksekusi dan Permohonan Somasi. Disamping itu kepaniteraan perdata juga menerima perlawanan yang merupakan Vezet terhadap putusan Verstek maupun perlawanan pihak ketiga (*deden Verzet*)

2.1.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Brebes pada Kepaniteraan Pidana Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Perkara pidana biasa
 - Sisa perkara tahun 2018 : 27 perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 175 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 184 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : 18 perkara
2. Perkara pidana anak-anak
 - Sisa perkara tahun 2018 : - perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 9 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 9 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : - perkara

3. Perkara pidana singkat
 - Sisa perkara tahun 2018 : - perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : - perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : - perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : - perkara
4. Perkara pidana cepat
 - Sisa perkara tahun 2018 : - perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 53 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 53 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : - perkara
5. Perkara pelanggaran lalu-lintas
 - Sisa perkara tahun 2018 : - perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 26.870 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 26.870 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : - perkara
6. Perkara pidana banding
 - Sisa perkara tahun 2018 : - perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 4 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 2 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : 2 perkara
7. Perkara pidana kasasi
 - Sisa perkara tahun 2018 : 7 perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 1 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 1 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : 7 perkara
8. Perkara pidana peninjauan kembali
 - Sisa perkara tahun 2018 : - perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : - perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : - perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : - perkara
9. Perkara permohonan grasi
 - Sisa perkara tahun 2018 : - perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : - perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : - perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : - perkara
10. Perkara praperadilan
 - Sisa perkara tahun 2018 : - perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : - perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : - perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : - perkara

2.1.2. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Brebes pada Kepaniteraan Perdata Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Perkara perdata gugatan
 - Sisa perkara tahun 2018 : 118 perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 31 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 38 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : 111 perkara
2. Perkara perdata gugatan sederhana
 - Sisa perkara tahun 2018 : 37 perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 38 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 37 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : 38 perkara
3. Perkara perdata permohonan
 - Sisa perkara tahun 2018 : 43 perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 253 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 251 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : 45 perkara
4. Perkara perdata banding
 - Sisa perkara tahun 2018 : 3 perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 5 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 8 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : - perkara
5. Perkara perdata kasasi
 - Sisa perkara tahun 2018 : 7 perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 3 perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : 1 perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : 7 perkara
6. Perkara perdata permohonan pk
 - Sisa perkara tahun 2018 : - perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : - perkara
 - Perkara yg diputus tahun 2019 : - perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : - perkara
7. Perkara perdata permohonan eksekusi
 - Sisa perkara tahun 2018 : 6 perkara
 - Perkara masuk tahun 2019 : 2 perkara
 - Perkara yang diputus tahun 2019 : - perkara
 - Sisa perkara tahun 2019 : 8 perkara

**REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA
PENGADILAN NEGERI BREBES
TAHUN 2019
Tabel. 1**

PERKARA						JUMLAH HAKIM	KETERANGAN
PIDANA			PERDATA				
Masuk	Putus	Sisa	Masuk	Putus	Sisa		
175	184	18	31	38	8	6	

2.2. PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BREBES

2.2.1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

- 1) Rekapitulasi Sisa Perkara yang Diputus
- ❖ Rekapitulasi sisa perkara pidana tahun 2018 yang diputus tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Perkara Sisa Perkara Pidana Tahun 2018 yang
Diputus Tahun 2019
Tabel. 2**

No	Jenis / Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Putus 2019
1	2	3	4
1	Pidana Biasa	27	18
2	Pidana Singkat	0	0
3	Pidana Cepat	0	0
4	Pidana Praperadilan	0	0
5	Pidana Khusus Anak	0	0

- ❖ Rekapitulasi sisa perkara perdata tahun 2018 yang diputus tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Perkara Sisa Perkara Perdata Tahun 2018 yang
Diputus Tahun 2019
Tabel. 3**

No	Jenis / Klasifikasi Perkara	Sisa 2018	Putus 2019
1	2	3	4
1	Perdata Permohonan	1	3
2	Perdata Gugatan	15	8
3	Perdata Gugatan Sederhana	2	3

2) Rekapitulasi Perkara yang Diputus

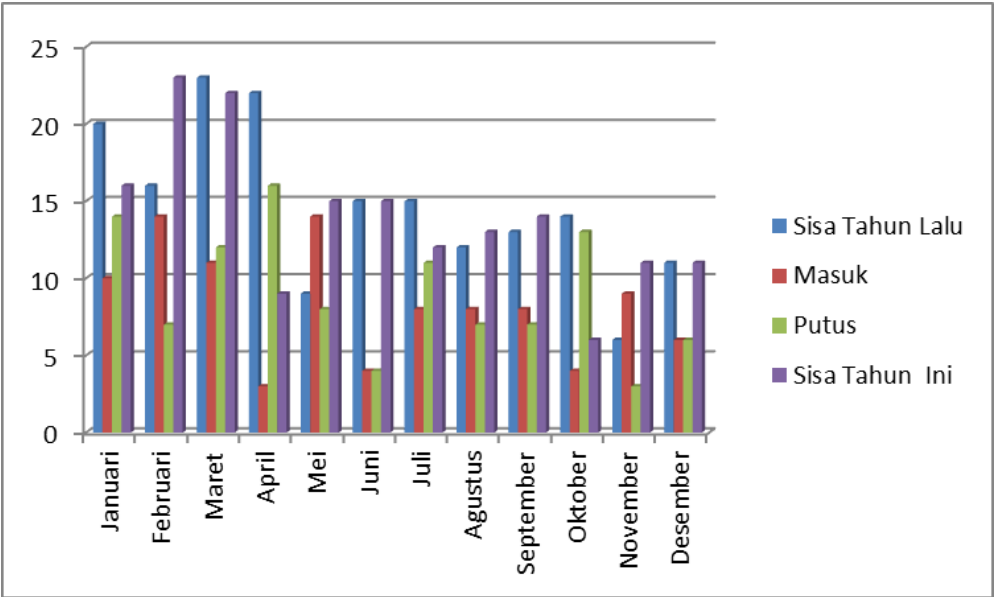
A) KEADAAN PERKARA PIDANA

1) Keadaan Perkara Pidana Biasa

Rekapitulasi keadaan perkara pidana biasa per bulan tahun 2019, Grafik rekapitulasi keadaan perkara pidana biasa per bulan tahun 2019 ditunjukan Gambar 1, sedangkan rekapitulasi keseluruhan keadaan perkara pidana biasa tahun 2019 ditunjukan pada Tabel. 4

Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Biasa
Per Bulan Tahun 2019
Tabel. 4

No	Bulan	Perkara			
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Januari	20	10	14	16
2	Februari	16	14	7	23
3	Maret	23	11	12	22
4	April	22	3	16	9
5	Mei	9	14	8	15
6	Juni	15	4	4	15
7	Juli	15	8	11	12
8	Agustus	12	8	7	13
9	September	13	8	7	14
10	Oktober	14	4	13	6
11	November	6	9	3	11
12	Desember	11	6	6	11
Total		176	99	108	167



Gambar. 1
Grafik Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Biasa
Perbulan Tahun 2019

**Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara
Pidana Biasa Tahun 2019**

Tabel. 5

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Biasa	27	175	184	18

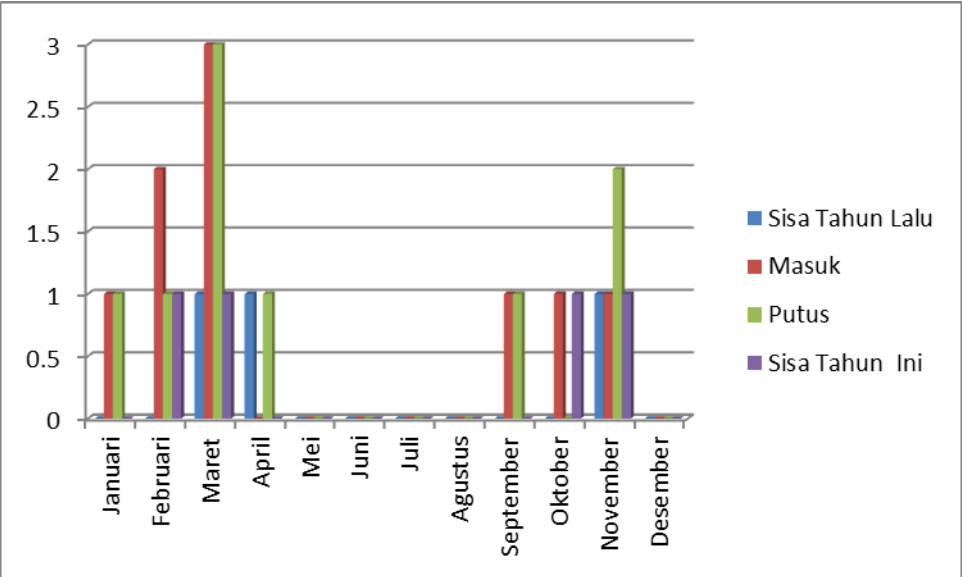
2) Keadaan Perkara Pidana Khusus Anak

Rekapitulasi keadaan perkara pidana khusus anak per bulan tahun 2019, grafik rekapitulasi keadaan perkara pidana khusus anak per bulan tahun 2018 ditunjukan Gambar 2, sedangkan rekapitulasi keseluruhan keadaan perkara pidana khusus anak tahun 2018 ditunjukan Tabel. 6

**Rekapitulasi Keadaan Perkara
Pidana Khusus Anak
Per Bulan Tahun 2019**

Tabel. 6

No	Bulan	Perkara			
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Januari	0	1	1	0
2	Februari	0	2	1	1
3	Maret	1	3	3	1
4	April	1	0	1	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	1	1	0
10	Oktober	0	1	0	1
11	November	1	1	2	1
12	Desember	0	0	0	0
Total			9	9	



Gambar. 2
Grafik Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Khusus Anak Perbulan Tahun 2019

Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Khusus Anak Tahun 2019

Tabel. 7

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Anak	3	9	9	3

3) Keadaan Perkara Pidana Singkat

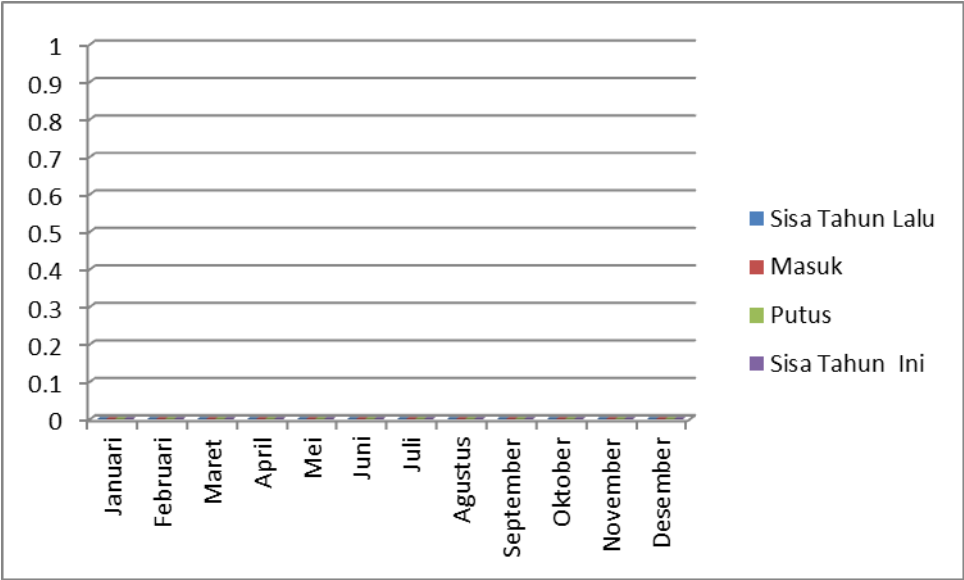
Rekapitulasi keadaan perkara pidana singkat per bulan tahun 2019, grafik rekapitulasi keadaan perkara pidana singkat per bulan tahun 2019 ditunjukan Gambar 3, sedangkan rekapitulasi keseluruhan keadaan perkara pidana singkat tahun 2019 ditunjukan Tabel. 8

Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Singkat Per Bulan Tahun 2019

Tabel. 8

No	Bulan	Perkara			
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0

6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0
Total					



Gambar. 3
Grafik Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Singkat
Perbulan Tahun 2019

Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara
Pidana Singkat Tahun 2019

Tabel. 9

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Singkat	0	0	0	0

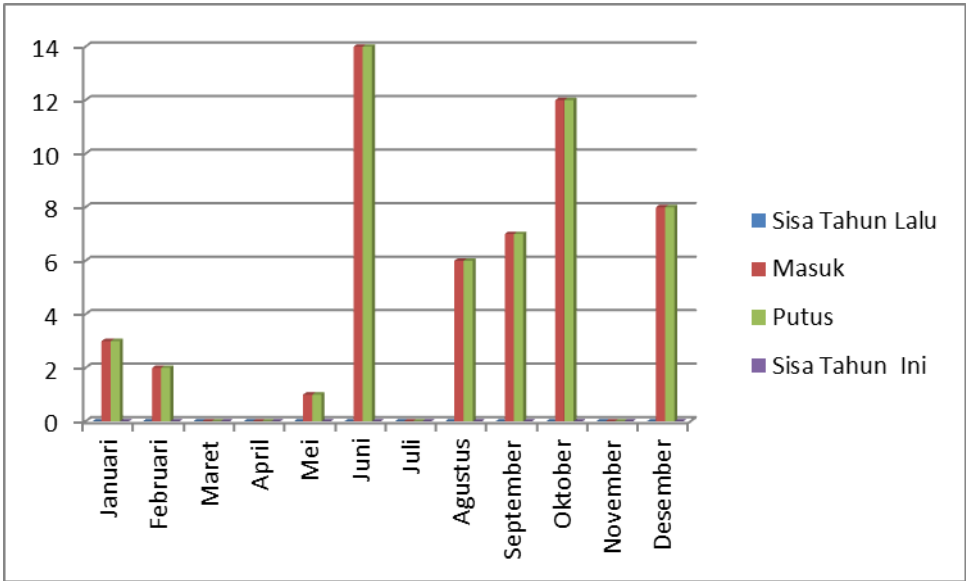
4) Keadaan Perkara Pidana Cepat

Rekapitulasi keadaan perkara pidana cepat per bulan tahun 2019, rekapitulasi keadaan perkara pidana cepat per bulan tahun 2019 ditunjukan Gambar 4, sedangkan rekapitulasi keseluruhan keadaan perkara pidana ringan cepat tahun 2019 sebagaimana ditunjukan Tabel. 10

Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Cepat Per Bulan Tahun 2019

Tabel. 10

No	Bulan	Perkara			
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Januari	0	3	3	0
2	Februari	0	2	2	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	1	1	0
6	Juni	0	14	14	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	6	6	0
9	September	0	7	7	0
10	Oktober	0	12	12	0
11	November	0	0	0	0
12	Desember	0	8	8	0
Total			53	53	



Gambar 4.
Grafik Rekapitulasi Keadaan Pidana Cepat
Per Bulan Tahun 2019

Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Cepat Tahun 2019

Tabel. 11

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Cepat	0	53	53	0

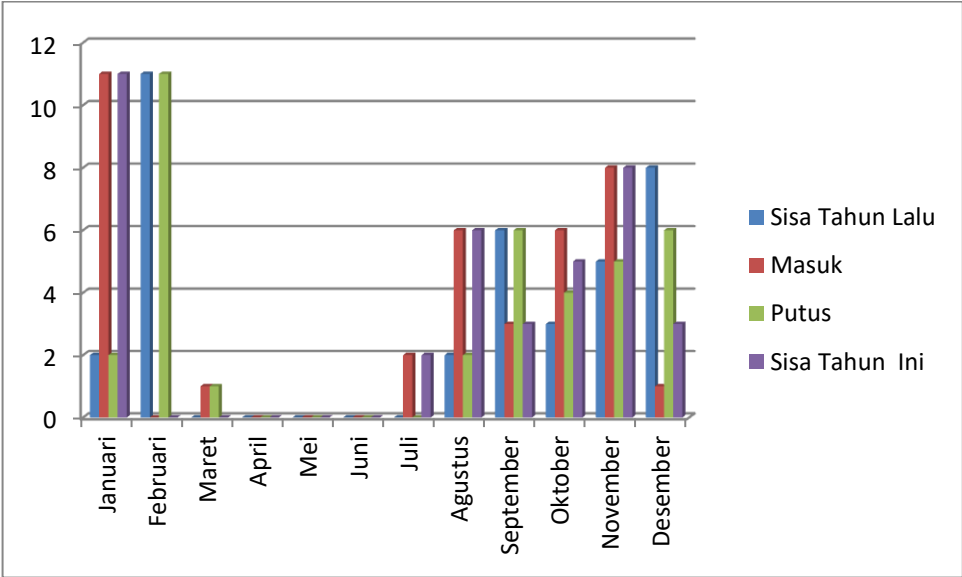
5) Keadaan Perkara Pidana Lalu Lintas

Rekapitulasi keadaan perkara pidana lalu lintas per bulan tahun 2019, grafik rekapitulasi keadaan perkara pidana lalu lintas per bulan tahun 2019 ditunjukkan Gambar 5, sedangkan rekapitulasi kесluruhan keadaan perkara pidana lalu lintas tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan Tabel. 12

Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Lalu Lintas
Per Bulan Tahun 2019

Tabel. 12

No	Bulan	Perkara			
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Januari	0	1709	1709	0
2	Februari	0	1587	1587	0
3	Maret	0	1373	1373	0
4	April	0	388	388	0
5	Mei	0	348	348	0
6	Juni	0	390	390	0
7	Juli	0	1034	1034	0
8	Agustus	0	6072	6072	0
9	September	0	5142	5142	0
10	Oktober	0	1528	1528	0
11	November	0	5283	5283	0
12	Desember	0	2016	2016	0
Total			26870	26870	



Gambar 5.
Grafik Rekapitulasi Keadaan
Pidana Lalu Lintas Per Bulan Tahun 2019

**Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara
Pidana Lalu Lintas Tahun 2019**

Tabel. 13

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Lalu Lintas	0	26870	26870	0

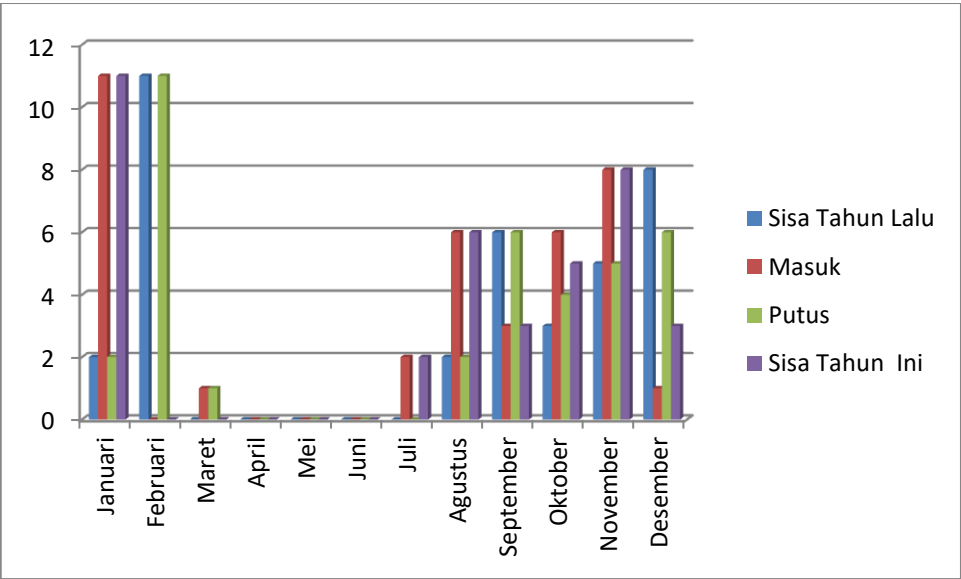
6) Pidana Praperadilan

Rekapitulasi keadaan perkara pidana praperadilan per bulan tahun 2019, grafik rekapitulasi keadaan perkara pidana lalu lintas per bulan tahun 2019 ditunjukan Gambar 6, sedangkan rekapitulasi keseluruhan keadaan perkara pidana lalu lintas tahun 2019 sebagaimana ditunjukan Tabel. 14

**Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Praperadilan
Per Bulan Tahun 2019**

Tabel. 14

No	Bulan	Perkara			
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Januari	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0
Total					



Gambar 6.
Grafik Rekapitulasi Keadaan Perkara Pidana Praperadilan Per Bulan Tahun 2019

Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Praperadilan Tahun 2019

Tabel. 15

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Praperadilan	0	0	0	0

7) Rekapitulasi Keseluruhan Perkara Pidana

Rekapitulasi keseluruhan keadaan perkara pidana tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan Tabel 16

Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara Pidana Tahun 2019

Tabel. 16

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Biasa	27	175	184	18
2	Pidana Anak	3	9	9	3
3	Pidana Singkat	0	0	0	0
4	Pidana Cepat	0	53	53	0

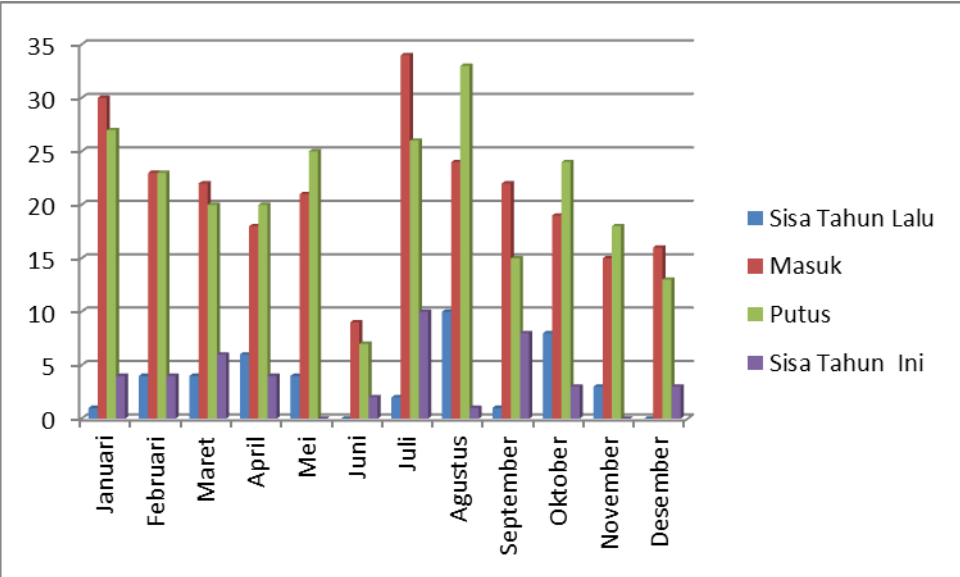
5	Pidana lalu Lintas	0	26870	26870	0
6	Pidana Praperadilan	0	0	0	0
Total		30	27107	27116	21

B) KEADAAN PERKARA PERDATA
1) Keadaan Perkara Perdata Permohonan

Rekapitulasi keadaan perkara perdata permohonan per bulan tahun 2019 ditunjukkan Tabel 17, grafik rekapitulasi keadaan perkara perdata permohonan per bulan tahun 2019 ditunjukkan Gambar 7, sedangkan rekapitulasi keseluruhan keadaan perkara perdata permohonan tahun 2019 sebagaimana ditunjukkan Tabel 18

**Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Permohonan
Per Bulan Tahun 2019**
Tabel. 17

No	Bulan	Perkara			
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Januari	1	30	27	4
2	Februari	4	23	23	4
3	Maret	4	22	20	6
4	April	6	18	20	4
5	Mei	4	21	25	0
6	Juni	0	9	7	2
7	Juli	2	34	26	10
8	Agustus	10	24	33	1
9	September	1	22	15	8
10	Oktober	8	19	24	3
11	November	3	15	18	0
12	Desember	0	16	13	3
Total		43	253	251	45



Gambar 7.
Grafik Rekapitulasi Keadaan Perdata Permohonan
Per Bulan Tahun 2019

Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara
Perdata Permohonan Tahun 2019

Tabel. 18

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Permohonan	43	253	251	45

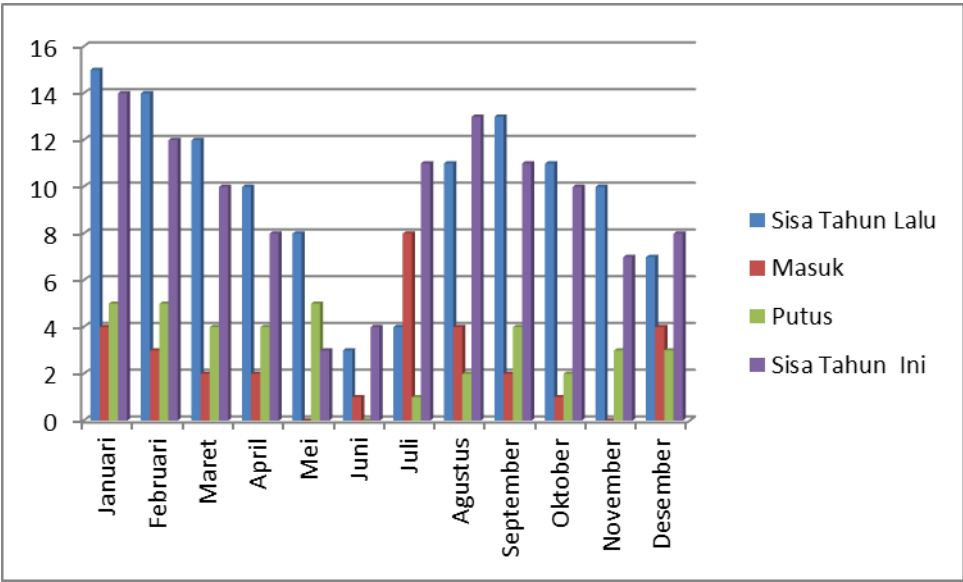
2) Keadaan Perkara Gugatan

Rekapitulasi keadaan perkara perdata gugatan per bulan tahun 2019 ditunjukan Tabel 18, grafik rekapitulasi keadaan perkara perdata gugatan per bulan tahun 2019 ditunjukan Gambar 8, sedangkan rekapitulasi keseluruhan keadaan perkara perdata gugatan tahun 2019 sebagaimana ditunjukan Tabel 19.

Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Gugatan
Per Bulan Tahun 2019

Tabel. 19

No	Bulan	Perkara			
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Januari	15	4	5	14
2	Februari	14	3	5	12
3	Maret	12	2	4	10
4	April	10	2	4	8
5	Mei	8	0	5	3
6	Juni	3	1	0	4
7	Juli	4	8	1	11
8	Agustus	11	4	2	13
9	September	13	2	4	11
10	Oktober	11	1	2	10
11	November	10	0	3	7
12	Desember	7	4	3	8
Total		118	31	38	111



Gambar 8.
Rekapitulasi Keadaan Perdata Gugatan
Per Bulan Tahun 2019

**Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara
Perdata Gugatan Tahun 2019**

Tabel. 20

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Gugatan	118	31	38	111

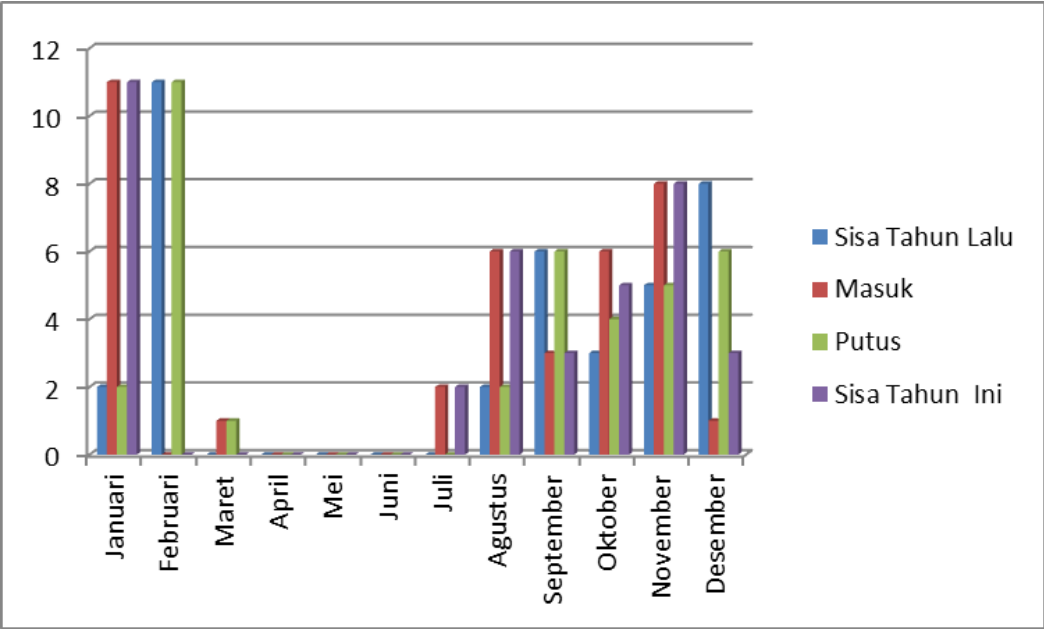
3) Keadaan Perkara Gugatan Sederhana

Rekapitulasi keadaan perkara perdata gugatan sederhana per bulan tahun 2019 ditunjukan Tabel 19, grafik rekapitulasi keadaan perkara perdata gugatan per bulan tahun 2019 ditunjukan Gambar 9, sedangkan rekapitulasi keseluruhan keadaan perkara perdata gugatan tahun 2019 sebagaimana ditunjukan Tabel 20.

**Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana
Per Bulan Tahun 2019**

Tabel. 21

No	Bulan	Perkara			
		Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Januari	2	11	2	11
2	Februari	11	0	11	0
3	Maret	0	1	1	0
4	April	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0
7	Juli	0	2	0	2
8	Agustus	2	6	2	6
9	September	6	3	6	3
10	Oktober	3	6	4	5
11	November	5	8	5	8
12	Desember	8	1	6	3
Total		37	38	37	38



Gambar 9.
Rekapitulasi Keadaan Perkara Perdata Gugatan Sederhana
Per Bulan Tahun 2019

Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan Perkara
Perdata Gugatan Sederhana Tahun 2019
Tabel. 22

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Gugatan Sederhana	37	38	37	38

4) Rekapitulasi Keseluruhan Perkara Perdata

Rekapitulasi keseluruhan keadaan perkara perdata tahun 2019 sebagaimana ditunjukan Tabel. 23

Rekapitulasi Keseluruhan Keadaan
Perkara Perdata Tahun 2019
Tabel. 23

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Permohonan	43	253	251	45
2	Perdata Gugatan	118	31	38	111
3	Perdata Gugatan Sederhana	37	38	37	38
Total		198	322	326	194

2.2.2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

1) REKAPITULASI PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

❖ Rekapitulasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 ditunjukan Tabel. 24

Rekapitulasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 ditunjukan Tabel. 24

Rekapitulasi Perkara Pidana yang Diselesaikan
Tepat Waktu Tahun 2019
Tabel. 24

No	Perkara	Perkara Putus	Putus Lebih dari 5 Bulan	Putus Kurang dari 5 Bulan (Tepat Waktu)
1	2	3	4	5
1	Pidana Biasa	184	0	0
2	Pidana Khusus Anak	9	0	0

2) REKAPITULASI PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

- ❖ Rekapitulasi perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 ditunjukkan Tabel. 25

Rekapitulasi perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu tahun 2019 ditunjukkan Tabel. 25

Rekapitulasi Perkara Perdata yang Diselesaikan
Tepat Waktu Tahun 2019
Tabel. 25

No	Perkara	Perkara Putus	Putus Lebih dari 5 Bulan	Putus Kurang dari 5 Bulan (Tepat Waktu)
1	2	3	4	5
1	Perdata Permohonan	251	0	0
2	Perdata Gugatan	38	0	0

2.2.3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI, DAN PK

1. Rekapitulasi Perkara yang mengajukan Upaya hukum Perkara Pidana

Rekapitulasi Keseluruhan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum tahun 2019 ditunjukkan tabel, sedangkan rekapitulasi perkara pidana yang mengajukan upaya hukum perjenis / Klasifikasi tahun 2019 ditunjukkan tabel. 26

Rekapitulasi Perkara Pidana Biasa yang mengajukan Upaya Hukum tahun 2019
Tabel. 26

No	Perkara	Perkara Putus	Putus Lebih dari 5 Bulan	Putus Kurang dari 5 Bulan (Tepat waktu)
1	2	3	4	5
1	Banding	0	4	2
2	Kasasi	0	0	0
3	Peninjauan Kembali	0	0	0

**Rekapitulasi perkara pidana yang mengajukan upaya hukum
Perjenis / Klasifikasi Perkara Tahun 2019**

Tabel. 27

No	Perkara	Perkara Putus	Banding	Kasasi	Putus Kurang dari 5 Bulan (Tepat waktu)
1	2	3		4	5
1	Pidana Biasa	184	4	5	0
2	Pidana Anak	9	0	0	0
3	Pidana Singkat	0	0	0	0
4	Pidana Cepat	53	0	0	0
5	Pidana Lalu Lintas	26870	0	0	0

1. Rekapitulasi Perkara perdata yang mengajukan Upaya hukum Perkara Perdata

Rekapitulasi perkara perdata yang mengajukan upaya hukum tahun 2019 ditunjukkan tabel 3, sedangkan Rekapitulasi perkara perdata yang mengajukan upaya hukum per jenis klasifikasi tahun 2009 ditunjukkan tabel 28.

Rekapitulasi perkara perdata yang mengajukan upaya hukum tahun 2019

Tabel. 28

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Banding	3	5	8	0
2	Kasasi	6	3	1	8
3	Peninjauan Kembali	0	0	0	0

Rekapitulasi perkara perdata yang mengajukan upaya hukum perjenis / klasifikasi perkara tahun 2019

Tabel. 29

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Permohonan	251	0	0	0
2	Perdata Gugatan	38	5	3	0

1. Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Perkara Pidana

Rekapitulasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Perkara pidana.

❖ Upaya Hukum Banding

Rekapitulasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2019 adalah sebagai berikut

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2019

Tabel 30

No	Perkara	Perkara Putus	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding
1	2	3	4	5
1	Pidana biasa	184	4	180
2	Pidana khusus anak	9	0	0

❖ Upaya Hukum Kasasi

Rekapitulasi perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019 adalah sebagai berikut

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019

Table. 31

No	Perkara	Perkara putus	Putus banding	Mengajukan kasasi	Tidak Mengajukan kasasi
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Biasa	184	2	1	181
2	Pidana Khusus Anak	9	0	0	0
3	Pidana Singkat	0	0	0	0
4	Pidana Cepat	53	0	0	0
5	Pidana Lalu Lintas	26890	0	0	0

- ❖ **Upaya Hukum peninjauan kembali**
Rekapitulasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2019 adalah sebagai berikut

Upaya yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2019

Tabel. 32

No	Perkara	Perkara Putus	Putus kasasi	Mengajukan Peninjauan kembali	Tidak mengajukan Peninjauan Kembali
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Biasa	184	0	0	0
2	Pidana Khusus Anak	9	0	0	0
total		193	0	0	0

1. **Rekapitulasi Perkara yang tidak mengajukan Upaya hukum Perkara Perdata**

- ❖ **Upaya Hukum Banding**
Rekapitulasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding tahun 2019

tabel. 33

No	Perkara	Perkara Putus	Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Banding
1	2	3	4	5
1	Perdata gugatan	38	5	33

- ❖ **Upaya Hukum Kasasi**
Rekapitulasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi
Tahun 2019
Tabel. 34**

No	Perkara	Perkara Putus	Putus Banding	Mebgajukan Kasasi	Tidak Mengajukan Kasasi
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Permohonan	0	0	0	0
02	Perdata Gugatan	0	5	3	2

❖ **Upaya Hukum Peninjauan Kembali**
 Rekapitulasi perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali tahun 2019
tabel. 35**

No	Perkara	Perkara Putus	Putus Kasasi	Mengajukan Peninjauan Kembali	Tidak Mengajukan Peninjauan Kembali
1	2	3	4	5	6
1	Perdata Gugatan	0	0	0	0

2.2.4. JUMLAH PERKARA PERDATA GUGATAN YANG BERHASIL DIMEDIASI

Rekapitulasi perkara perdata gugatan yang berhasil dimediasi
 Rekapitulasi perkara perdata gugatan yang berhasil dimediasi melalui dimediasi tahun 2019 sebagai berikut :

- 3/Pdt.G/2019/PN Bbs
- 12/Pdt.G/2019/PN Bbs

2.2.5. JUMLAH PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Rekapitulasi Perkara pidana khusus anak yang berhasil melalui Diversi

Rekapitulasi Perkara pidana khusus anak yang berhasil melalui Diversi tahun 2019 ditunjukkan tabel. 36

**Perkara pidana khusus anak yang berhasil melalui
Diversi Tahun 2019
tabel. 36**

Sisa tahun lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini	Diversi
1	2	3	4	5
NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- ❖ **Rekapitulasi Perkara Pidana Yang Mengajukan Grasi**
Rekapitulasi Perkara Pidana Yang Mengajukan Grasi tahun 2019 ditunjukkan tabel. 37

**Rekapitulasi Perkara Pidana Yang Mengajukan
Grasi Tahun 2019
Tabel. 37**

No	Perkara	Tundaan Tahun Lalu	Masuk	Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tundaan Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perkara Pidana Yang Mengajukan permohonan Grasi	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- ❖ **Rekapitulasi Perkara Perdata Yang Mengajukan Permohonan Eksekusi Tahun 2019**

Rekapitulasi Perkara Perdata Yang Mengajukan Permohonan Eksekusi Tahun 2019 ditunjukkan tabel. 38

**Rekapitulasi Perkara Perdata Yang Mengajukan
Permohonan Eksekusi
Table. 38**

No	Perkara	Sisa Tahun lalu	Masuk	Dilaksanaan	Dicabut	Sisa Tahun ini
1	2	3	4	5	6	7
1	Permohonan Perkara					

Perdata Yang Mengajukan Permohonan Eksekusi	9	2	0	1	10

2.3. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKAT ISO PENGADILAN)

Akreditasi Penjaminan Mutu Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (Court of Excellence). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035.

Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B telah mendapatkan Sertifikasi dari Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum dengan No Sertifikat TAPM. 031/QMR/SERTIFIKAT/7/2017 dengan nilan **“A EXCELLENT”**.

Sertifiakat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum pada kantor Negeri Brebes ditunjukkan pada Gambar No.10



Gambar. 10

2.3.1. Posbakum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak hak pencari keadilan diluar persidangan (non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil didalam persidangan. Pos Bantuan Hukum yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Brebes adalah berupa jasa Advokat/Pengacara Piket untuk memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat terutama untuk masyarakat tidak mampu. Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Brebes telah memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat sebanyak 40 orang.

2.3.2. Sidang keliling / pelayanan terpadu

Sidang Keliling yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai). Pada tahun 2019 Pengadilan Negeri Brebes tidak melaksanakan Sidang Keliling dikarenakan tidak ada permohonan untuk pelaksanaan Sidang Keliling tersebut. Sedangkan untuk sidang di tempat sidang tetap di luar gedung Pengadilan Negeri Brebes tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Pengadilan Negeri Brebes tidak memiliki tempat sidang tetap di luar gedung Pengadilan Negeri Brebes.

Pagu Anggaran dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Brebes untuk sidang di luar gedung Pengadilan Negeri Brebes pada tahun 2019 adalah 0 (NIHIL) sehingga realisasi anggarannya juga 0 (NIHIL).

2.3.3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

1. Pengertian Pembebasan Biaya Perkara

Pengertian pembebasan biaya perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Negara menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Negeri Brebes sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat

berperkara secara cuma-cuma. Tidak ada perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B tahun 2019

2. Penerima Layanan Pembebasan Biaya Perkara

Penerima layanan pembebasan biaya perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara.

3. Pembebasan Komponen Pembiayaan Layanan Biaya Perkara

Pembebasan komponen pembiayaan layanan biaya perkara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah sebagai berikut :

(1) Komponen biaya sebagai akibat dari pembebasan biaya perkara terdiri dari :

- Materai
- Biaya Pemanggilan para pihak
- Biaya Pemberitahuan Isi Putusan
- Biaya Sita Jaminan
- Biaya Pemeriksaan Setempat
- Biaya Saksi/Ahli
- Biaya Eksekusi
- Alat Tulis Kantor (ATK)
- Penggandaan/foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
- Penggandaan salinan putusan
- Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu
- Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
- Pengadaan perlengkapan kerja Kepaniteraan yang habis pakai

(2.) Dalam hal permohonan Pembebasan Biaya Perkara dikabulkan, penerima layanan pembebasan biaya perkara tidak akan dipungut Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi dan Leges dan penerimaan negara bukan pajak lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- a. Pemegang kas biaya perkara mencatatkan Biaya Pendaftaran Perkara, Biaya Redaksi, dan Leges sebagaimana dimaksud pada butir 2 sebagai nihil.
- b. Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak dibebankan pada pihak yang berperkara.

4. **Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan Negeri Brebes**

Pagu Anggaran dalam DIPA 03 Pengadilan Negeri Brebes untuk layanan pembebasan biaya perkara pada tahun 2019 adalah 0 (NIHIL) sehingga realisasi anggarannya juga 0 (NIHIL).

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

3.1. KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / GOLONGAN / PENDIDIKAN

A. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Berdasarkan Pangkat dan Golongan
Tabel. 39

No	Jabatan	PANGKAT/GOL.RUANG																
		IV					III				II				I			
		a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d
1.	Ketua			1														
2.	Wakil Ketua																	
3.	Hakim	1							1	3								
4.	Panitera	1																
5.	Sekretaris									1								
6.	Wakil Panitera									1								
7.	Panmud Perdata									1								
8.	Panmud Pidana									1								
9.	Panmud Hukum								1									
10.	Panitera Pengganti								3	1								
11.	Jurusita							2										
12.	Jurussita Pengganti											1						
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan,TI dan Pelaporan								1									
14.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana								1									
15.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan								1									
16.	Staf Pelaksana							1	1			2						
17.	CPNS						2											
JUMLAH		2	-	1	-	-	2	3	9	8	-	3	-	-	-	-	-	-

a) Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

Pembinaan sumber daya manusia teknis yudisial dilakukan dengan mengikutsertakan para hakim dan pegawai fungsional Pengadilan Negeri Brebes untuk mengikuti program- program pelatihan atau seminar-seminar teknis yang diadakan oleh instansi terkait secara vertikal atau horizontal guna meningkatkan skill (kemampuan) teknis yudisialnya.

Adapun dalam rangka peningkatan mutu kesadaran masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Pengadilan Negeri Brebes mengadakan kegiatan penyuluhan hukum dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang dilakukan melalui tiap-tiap kecamatan.

Daftar sumber daya manusia teknis yudisial Pengadilan Negeri Brebes tahun 2019.

**Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial
Pengadilan Negeri Brebes
Tahun 2019
Tabel. 40**

No	Nama	NIP	Gol / Ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Edi Saputra Pelawi, SH., MH.	19670612 199403 1 007	IV/c	Ketua	
2	Sri Sulastuti, SH	19770924 200212 2 003	IV/a	Hakim	
3	Tri Mulyanto, SH	19771207 200312 1 001	III/c	Hakim	
4	Galuh Rahma Esti, SH., MH	19800617 200604 2 003	III/d	Hakim	
5	Dian Anggraini Meksowati, SH., MH	19810607 200704 2 002	III/d	Hakim	
6	Nani Pratiwi, SH	19860827 200904 2 004	III/d	Hakim	
7	Abdul Kadir Djailani, SH	19680310 198803 1 003	IV/a	Panitera	
8	Sudrajat, SH.	19650713 199403 1 004	III/d	Wapan	
9	Mulyanto, SH	19640708 198903 1 005	III/d	Panmud Pidana	
10	Ruwaedah, SH.	19630403 199603 2 001	III/d	Panmud Perdata	
11	Sutriono, SH.	19790718 200212 1 008	III/c	Panmud Hukum	
12	Hj. Fasikhah	19600115 198303 2 002	III/d	Panitera Pengganti	Diperbantukan di Kepaniteraan Perdata
13	Imam Bashori, SH	19730103 199303 1 002	III/d	Panitera Pengganti	Diperbantukan di Kepaniteraan Pidana
14	Fransisca Reny Anggraini, S.H.	19820802 200904 2 006	III/c	Panitera Pengganti	Diperbantukan di Kepaniteraan Perdata
15	Mas Bambang Andri Raharjo, SH	19851027 200912 1 003	III/c	Panitera Pengganti	Diperbantukan di Kepaniteraan Hukum
16	Rojikin	19660516 199003 2 002	III/b	Jurusita	Diperbantukan di Kepaniteraan Perdata
17	Sugiarti	19701109 199303 1 003	III/b	Jurusita	Diperbantukan di Kepaniteraan Hukum
18	Erik Irawan	19820610 201212 1 003	II/b	Jurusita Pengganti	Diperbantukan di Kepaniteraan Pidana

**Jumlah Sumber Daya Manusia
Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Brebes
Berdasarkan Jabatan
Tahun 2019
Tabel. 41**

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua	1	
2	Wakil Ketua	-	
3	Hakim	5	
4	Panitera	1	
5	Wakil Panitera	1	
6	Panitera Muda (Pidana, Perdata, Hukum)	3	
7	Panitera Pengganti	5	
8	Jurusita	2	
9	Jurusita Pengganti	1	
10	CPNS	1	
Jumlah SDM Teknis Yudisial		20	

b) Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Pembinaan sumber daya manusia non teknis yudisial dilakukan juga dengan mengikut sertakan para hakim dan staf untuk mengikuti program-program pelatihan atau seminar- seminar non teknis, diantaranya adalah :

- Bintek TI (Teknologi Informasi)
- Bintek SIMAK BMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara) dan Persediaan
- Bintek Bendahara Keuangan/ SiLaBi (Sistem Laporan Bendahara Instansi)
- Bintek RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga)
- Bintek SAKPA (Sistem Akutansi Keuangan Pengguna Anggaran)
- Bintek SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian)
- Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa

Daftar sumber daya manusia non teknis yudisial Pengadilan Negeri Brebes pada tahun 2019

**Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Pengadilan Negeri Brebes
Tahun 2019
Tabel. 42**

No	Nama	NIP	Gol / Ruang	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Rr. Sarsanti Kartika Dewi, SH	19740226 199303 2 002	III/d	Sekretaris	
2	Moch. Asyhari, SE	19791123 200912 1 005	III/c	Kasubbag Umum dan Keuangan	
3	Nekka Pranudya Murwanto	19800427 201101 1 009	III/c	Kasubbag Perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan	
4	Moh. Abid, SH	19801115 201101 1 009	III/c	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	
5	U s m a n	19620413 198903 1 002	III/a	Staf	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
6	Imron Arsadi	19680113 201212 1 001	II/b	Staf	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
7	Endang Dikuwati	19671104 201408 2 002	II/b	Staf	Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan
8	Hannah Yohanda, SH	19960830 201903 2 005	III/a	CPNS	Staf Sub Bagian Kepaniteraan Perdata
9	Akhpriyani Trisnawati, S.IP	19930430 201903 2 005	III/a	CPNS	Staf Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

**Jumlah Sumber Daya Manusia
Non Teknis Yudisial Pengadilan Negeri Brebes
Berdasarkan Jabatan
Tahun 2019
Tabel. 43**

No	Jabatan	Jumlah Pegawai (Orang)	Keterangan
1	2	3	4
1	Sekretaris	1	
2	Kasubbag Umum dan Keuangan	1	
3	Kasubbag Perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan	1	
4	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	
5	Staf	3	
6	CPNS	1	
Jumlah SDM Non Teknis Yudisial		8	

c) Pengisian Jabatan Struktural

Pengisian jabatan struktural kepaniteraan dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri Brebes pada Tahun 2019

**Daftar Pejabat Struktural
Pengadilan Negeri Brebes
Tahun 2019
Tabel. 44**

No	Nama	NIP	Gol / Ruang	Jabatan
1	2	3	4	5
1	Edi Saputra Pelawi, SH., MH.	19670612 199403 1 007	IV/c	Ketua
2	-	-	-	Wakil Ketua
3	Abdul Kadir Djailani, SH	19680310 198803 1 003	IV/a	Panitera
4	Sudrajat, SH.	19650713 199403 1 004	III/d	Wakil Panitera
5	Mulyanto, SH	19640708 198903 1 005	III/d	Panmud Pidana
6	Ruwaedah, SH.	19630403 199603 2 001	III/d	Panmud Perdata
7	Sutriono, SH.	19790718 200212 1 008	III/c	Panmud Hukum
8	Rr. Sarsanti Kartika Dewi, SH	19740226 199303 2 002	III/d	Sekretaris
9	Moch. Asyhari, SE	19791123 200912 1 005	III/c	Kasubbag Umum dan Keuangan
10	Nekka Pranudya Murwanto	19800427 201101 1 009	III/c	Kasubbag Perencanaan, Teknologi informasi dan Pelaporan
11	Moh. Abid, SH	19801115 201101 1 009	III/c	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

3.1.1. Mutasi

Pada tahun 2019 terdapat beberapa Hakim dan Pegawai yang Mutasi pada Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B, antara lain :

- Nur Syaeful Mukmin, SH, MH Mutasi dari Pengadilan Negeri Brebes ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
- Muzayanah, SH Mutasi dari Pengadilan Negeri Brebes ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
- Baiq Nirwanawati, S.AP Mutasi dari Pengadilan Negeri Brebes ke Pengadilan Negeri Kebumen.
- Abdul Kadir Djailani, SH. Mutasi dari Pengadilan Negeri Sampang ke Pengadilan Negeri Brebes.
- Rr. Sarsanti Kartika Dewi, SH Mutasi dari Pengadilan Negeri Pemalang ke Pengadilan Negeri Brebes.
- Nekka Pranudya Murwanto, SE, SH Mutasi dari Pengadilan Negeri Ungaran ke Pengadilan Negeri Brebes.

3.1.2. Promosi

Pada tahun 2019 terdapat beberapa Hakim dan Pegawai yang Promosi pada Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B, antara lain :

- Nur Syaeful Mukmin, SH, MH Promosi dari Panitera pada Pengadilan Negeri Brebes menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
- Muzayanah, SH Promosi dari Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Brebes menjadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.
- Mulyanto, SH Promosi dari Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Brebes menjadi Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Brebes.
- Sutriono, SH Promosi dari Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes menjadi Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Negeri Brebes.
- Nekka Pranudya Murwanto, SE, SH Promosi dari Pengadilan Negeri Ungaran ke Pengadilan Negeri Brebes.

3.1.3. Pensiun

Pada Tahun 2019, Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B memiliki (satu) pegawai pensiun antara lain :

- Carso, Jabatan Panitera Pengganti TMT pensiun 01-05-2019.

3.1.4. Diklat

Pada tahun 2019, Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B mengirim Hakim maupun Pegawai untuk mengikuti diklat, diantaranya adalah :

- Akhpriyani Trisnawati, S.I.P pelaksanaan diklat tanggal 4 November s/d 28 Desember 2019 "Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Gelombang II".
- Hannah Yohanda, S.H pelaksanaan diklat tanggal 4 November s/d 28 Desember 2019 "Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan III Gelombang II".

BAB IV

4.1. PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

4.1.1. PENGELOLAAN KEUANGAN

a) DIPA-005.01.2.097776 / 2019

Belanja Pegawai

Belanja pegawai pada Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta belanja uang lembur, sementara belanja vakasi tidak ada.

- Pagu Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.169.809.000,-
- terealisasi sebesar Rp. 3.157.135.416
- sisa sebesar Rp.12.673.584.
- Belanja Pegawai terdiri dari Belanja Gaji dan tunjangan PNS sebesar 2.960.529.000,-,
- Belanja Uang Makan sebesar Rp. 209.280.000,-.
- Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan terealisasi sebesar Rp. 2.950.848.416,-
- dan Sisa Belanja Gaji Pokok dan Tunjangan sebesar Rp. 9.680.584,-
- Belanja Uang Makan PNS terealisasi sebesar Rp. 206.287.000,- dan
- Sisa Belanja Uang Makan PNS sebesar Rp. 2.993.000,-

Belanja Barang

Pagu Belanja Barang Operasional pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.066.066.000,-, terealisasi sebesar Rp. 1.065.521.735,- dan Sisa Belanja Barang sebesar Rp. 544.265,-

Belanja Modal

Pagu Belanja Modal Pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 49.948.000,- dan sisa Belanja Modal Rp. 52.000.

b) DIPA-005.03.2.099097/2019

Belanja Barang

Pagu Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 92.320.000,-, terealisasi sebesar Rp. 92.057.600,- dan Sisa Belanja Barang sebesar Rp. 262.400,-

4.1.2. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

➤ Kendaraan Dinas roda 4 (empat) :

Untuk saat ini pemenuhan kendaraan roda 4 di Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B ada 5 (lima), yang terdiri dari 3 pinjam pakai dari PEMDA Brebes, 1 Hibah dari PEMDA Brebes dan 1 Transfer Masuk dari Mahkamah Agung R.I.

➤ Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) ;

Di Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B untuk tahun 2019 tidak ada penambahan kendaraan bermotor. Untuk saat ini, Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B memiliki 18 unit sepeda motor yang terdiri dari 11 Kendaraan dari Saldo Awal di Tahun 2019 dan 7 dari Mahkamah Agung R.I, dan terdapat 3 kendaraan sepeda motor yang rusak berat, maka untuk mendukung kelancaran tugas diharapkan adanya penambahan kendaraan dinas roda dua terutama untuk Pejabat Struktural dan staff yang tugasnya berhubungan dengan instansi lain.

4.1.3. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Teknologi Informasi di era modern seperti saat ini sangatlah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas Pengadilan Negeri sebagai lembaga Pelayanan Publik di Bidang Hukum. Dengan adanya Surat Keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor 44/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Dukungan Teknologi Informasi sangat diperlukan dalam lingkungan peradilan, terutama peranannya dalam percepatan publikasi Putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun Publikasi jadwal sidang di Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di Pengadilan.

Dukungan teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk kepentingan layanan kepada public, namun juga sangat diperlukan dalam percepatan proses administrasi dalam lingkungan pengadilan, hal ini diperkuat dengan adanya aplikasi administrasi mulai dari KOMDANAS, SIMPONI (Aplikasi yang berhubungan dengan Pajak), SAPK (Aplikasi yang berhubungan dengan Kepegawaian) sampai dengan aplikasi SIMAK BMN (Aplikasi yang berhubungan dengan keluar masuknya barang) serta DIREKTORI PUTUSAN.

1. Perangkat Keras

Pengelolaan teknologi informasi di Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B didukung dengan sarana pengolahan data berupa 19 komputer PC unit, 14 Laptop, 20 printer, 5 Scanner, 1 pc layar sentuh, 1 pc bentuk android layar sentuh, 1 Mikrotik, 2 Server dan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan komputer 2 orang

2. Perangkat Lunak

Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B telah dilengkapi dengan program perangkat lunak berupa Software yang mendukung tata kerja di Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B dan didukung aplikasi baik di kepaniteraan maupun di kesekretariatan sehingga mudah di publikasikan melalui Website serta sebuah aplikasi IKM Berbasis android yang mempermudah Pejabat Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B untuk mengetahui antusiasme atau kepuasan pengunjung para pencari keadilan yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Kelas IB, serta berfungsi untuk memudahkan pengunjung para pencari keadilan untuk menilai Kinerja Kantor Pengadilan Negeri Brebes Kelas IB. Disamping itu Pengadilan Negeri Brebes juga menciptakan aplikasi Pencarian Data Tilang yang bisa di akses langsung melalui website, sehingga masyarakat pengguna lebih mudah mengetahui denda tilang berdasarkan no registrasi pada surat tilang.

4.1.3.1. Implementasi e-court dilingkungan Peradilan Umum

E-court adalah layanan pendaftaran perkara, pembayaran dan pemanggilan secara *online* di lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung (peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer).

Dengan adanya terobosan ini, MA telah menjawab harapan dan cita-cita para pencari keadilan yaitu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maklum selama ini masyarakat banyak mengeluh karena proses berperkara di pengadilan sangat lama, mahal, dan terkesan bertele-tele.

Dasar hukum aplikasi *e-court* adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Eletronik (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018) yang diundangkan pada tanggal 4 April 2018. Peluncuran *e-court* sendiri dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali pada tanggal 13 Juli 2018 di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur.

Perma ini mencakup layanan administrasi perkara perdata, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara. Isinya mengatur proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, serta berbagai tata kelola administrasi online. Pada Menu e-litigation dapat diselenggarakan persidangan perkara perdata secara elektronik sesuai hukum acara yang berlaku. Misalnya, acara penyampaian gugatan/ permohonan/ bantahan/ perlawanan, penyampaian replik, duplik, kesimpulan, dan pembacaan putusan/penetapan.

Setidaknya ada tiga aplikasi yang diusung oleh MA dalam sistem *e-court* tersebut, yaitu pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar uang perkara (*e-payment*) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (*e-summons*).

Melalui aplikasi pendaftaran perkara (*e-filing*) misalnya, advokat atau masyarakat umum yang sudah terdaftar, dapat melakukan pendaftaran gugatan/permohonan secara elektronik tanpa harus datang ke pengadilan, memilih pengadilan yang berwenang, mendaftarkan surat kuasa khusus, membayar PNBP surat kuasa, menginput para pihak, mengunggah dokumen gugatan/permohonan dapat dilakukan secara elektronik.

Bahkan untuk menghemat waktu, surat jawaban, replik, duplik dan/atau kesimpulan dapat dikirim secara elektronik tanpa perlu sidang, dengan catatan para pihak setuju menggunakan aplikasi ini. Apabila dihitung-hitung maka para pihak hanya perlu sidang 4-6 kali saja yaitu, pada saat mediasi, pembacaan gugatan, pemeriksaan saksi, alat bukti, dan pembacaan putusan.

Untuk pembayaran perkara juga dapat dilakukan dengan aplikasi (*e-payment*), dimana penggugat/pemohon nanti akan memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran elektronik, lalu melakukan pembayaran, dan setelah mendapat konfirmasi maka akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).

Panggilan sidang pun sudah tidak perlu lagi melalui pos atau juru sita, penggugat akan dipanggil secara elektronik (baca: lewat *e-mail*), untuk tergugat/termohon untuk pertama kali

dipanggil secara manual, lalu untuk proses sidang selanjutnya dapat dilakukan secara elektronik asal disetujui kedua belah pihak. Aplikasi ini juga digunakan untuk memberitahu putusan secara elektronik.

Pihak yang Diuntungkan


Kalangan yang paling diuntungkan dari penerapan aplikasi ini adalah advokat, karena selain memudahkan pendaftaran perkara, jadwal sidang pun sudah dipangkas hampir setengah, sehingga para advokat lebih fokus untuk riset penanganan kasus yang sedang ditanganinya. Hadirnya Perma ini juga menjadi jawaban bagi masyarakat pencari keadilan (*Justicia Bellen*) yang selama ini terkendala waktu, jarak dan biaya.

Belum lagi jalanan yang masih berkontur tanah, ditambah lagi misalnya ada kesalahan format dan substansi gugatan, maka akan memakan waktu sehari-hari hanya untuk mengurus pendaftaran perkara saja, ini tentu buang waktu (*waste of time*).

Dengan sistem ini pembayaran panjar perkara pun lebih murah, karena panggilan sidang secara elektronik tidak berbayar alias nihil. Bisa dibandingkan dengan biaya panggilan secara manual yang memakai sistem radius. Dan tentu biaya ini sangat memberatkan bagi para pencari keadilan yang berekonomi lemah.

4.1.3.2. Implementasi SIPP dilingkungan Peradilan Umum

Berdasarkan surat dari Dirjen Badilum No 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. bahwa "pengadilan yang dapat mencapai nilai pada aplikasi Evaluasi SIPP sebesar 600 selama 3 bulan berturut-turut", dapat mengajukan usulan untuk sepenuhnya mengimplementasikan pencatatan dan register perkara secara elektronik. Bahwa Pengadilan Negeri Brebes wajib menerapkan Aplikasi Monitoring SIPP yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.



Pengadilan Negeri Brebes telah melakukan sinkronisasi data SIPP ke SIPP MARI 3 (tiga) kali dalam sehari, terus Pengadilan Negeri Brebes juga sudah mengupload dokumen putusan ke SIPP, selain itu Pengadilan Negeri Brebes juga sudah melakukan panggilan delegasi dan buktinya juga sudah diupload ke SIPP.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

5.1. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Pengadilan Negeri Brebes mulai awal tahun 2016 telah melakukan beberapa hal dalam rangka menuju Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum. Hal ini dilakukan dalam upaya membangun citra positif Peradilan melalui berbagai Kebijakan pembaruan untuk mewujudkan Pengadilan yang Agung (***Court of Excellence***). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam Dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (***Blue Print***) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035.

Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan Badan Peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka Pengadilan yang unggul (***The Framework of Courts Excellence***). Kerangka ini terdiri dari 7 (*tujuh*) Area “**Peradilan yang Agung**” yang dibagi ke dalam 3 (*tiga*) Fungsi, yaitu: **Pengarah / Pengendali** (*Driver*), **Sistem dan Penggerak** (*System and Enabler*), dan **Hasil** (*Result*).

1. Sebagai Fungsi Pengarah adalah Area:

- Kepemimpinan Dan Manajemen Pengadilan

2. Fungsi Sistem dan Penggerak, berada dalam Area:

- Kebijakan-Kebijakan Pengadilan;
- Sumber Daya Manusia, Sarana-Prasarana Dan Keuangan;
- Penyelenggaraan Persidangan;

3. Sedangkan Fungsi hasil dalam Area:

- Kebutuhan Dan Kepuasan Pengguna Pengadilan;
- Pelayanan Pengadilan Yang Terjangkau;
- Kepercayaan Dan Keyakinan Masyarakat Pada Pengadilan;

Setelah dilakukan audit oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Pengadilan Negeri Brebes memperoleh nilai “A” (*Excellent*). Penyerahan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu dilakukan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes, pada tanggal 24 Juli 2017 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Banyuwangi.

Sebagai konsekuensi Pengadilan Negeri Brebes memperoleh nilai “A” (*Excellent*) dalam penilaian akreditasi penjaminan mutu maka Pengadilan Negeri Brebes akan dilakukan audit surveillance (pengawasan) sebanyak 4 (empat) kali.

Hasikan audit surveillance (pengawasan) oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah bahwa Pengadilan Negeri Brebes mampu mempertahankan nilai "A" (*Excellent*)

5.2. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) merupakan aplikasi resmi yang di-*release* Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI, yang merupakan sebuah instrumen Pengadilan Negeri sebagai bentuk kemudahan dan kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kegiatan pendaftaran surat masuk dan keluar, buku tamu, permohonan surat keterangan, permohonan penyitaan dan penggeledahan. Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dibuat dengan DNS lokal sendiri dengan alamat : <http://192.168.2.100/ptsp/login>.

Dengan dibuat DNS lokal maka aplikasi ini hanya dapat diakses oleh *user* atau pengguna yang tersambung dengan jaringan LAN Pengadilan Negeri Brebes. Tampilan Aplikasi PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Brebes. Melalui PTSP ini Mahkamah Agung ingin memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal sampai akhir/terbitnya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat. Wujud keseriusan Mahkamah Agung dan jajaran Pengadilan di bawahnya terhadap penerapan PTSP tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Pengadilan Negeri Brebes sebagai lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung, sejak sekitar bulan Februari tahun 2018 sudah mulai menerapkan standar PTSP sesuai Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Negeri Brebes ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini bertujuan untuk memberikan layanan prima juga untuk mempermudah pelayanan dan menghindari Praktek KKN, pungutan liar dan untuk peningkatan pelayanan bagi pencari keadilan Pengadilan Negeri Brebes. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ini sebagai wujud Program Pengadilan Negeri Brebes dalam Rangka mewujudkan wilayah bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), sehingga dengan diterapkannya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) maka pencari Keadilan dapat dilayani dengan cepat dan untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu adanya komitmen bersama dari seluruh Pimpinan, Para Hakim dan seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Negeri Brebes.

Selain itu Fitur – fitur yang terdapat di dalam aplikasi PTSP antara lain :

1. Register Surat Masuk dan Surat Keluar
2. Register Buku Tamu
3. Pembuatan Surat Keterangan Yang Sudah Terstandarisasi antara lain:
 - Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit
 - Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana
 - Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya
 - Surat Keterangan Dipidana karena Kealpaan ringan atau alasan politik
 - Surat Keterangan Tidak memiliki tanggungan utang
4. Ijin Penyitaan/Penggeledahan



Gambar. 11

Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut:

1. Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan,
2. Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan,

3. Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.


Pelaksanaan program PTSP ini sangatlah diperlukan komitmen oleh seluruh Pimpinan dan Aparatur Pengadilan secara terintegrasi dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu dalam rangka mewujudkan keberhasilan pelaksanaan PTSP tersebut, maka haruslah terdapat kualifikasi tertentu dalam hal standarisasi pelayanan yang harus dimiliki oleh seluruh petugas PTSP, yang antara lain sebagai berikut:

1. Memahami Standar Layanan Pengadilan, prosedur administrasi maupun prosedur beracara di Pengadilan untuk setiap jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri,
2. Memahami profil pengadilan seperti struktur organisasi dan persidangan, peraturan, keputusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum,
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer,
4. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersikap sopan dan ramah, serta berpenampilan rapi.

5.3. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Brebes mempunyai 3 (Tiga) Inovasi Aplikasi Pelayanan Publik yang dimana aplikasi ini bisa membantu para pencari keadilan. Adapun aplikasi inovasi pada Pengadilan Negeri Brebes antara lain :

1. Aplikasi e-Tilang
Pengadilan Negeri Brebes mempunyai aplikasi Inovasi Pelayanan Publik berupa aplikasi tilang, yang dimana aplikasi tilang ini bisa mencari nama maupun nomer tilang dengan cara yang sangat cepat. Hal ini untuk membantu para pencari keadilan yang merasa kesulitan dalam mengetahui berapa berasan denda tilang yang telah dilanggarnya.
2. Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat
Pengadilan Negeri Brebes mempunyai aplikasi Inovasi Pelayanan Publik berupa aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat, yang dimana Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur



penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survey IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.

3. Aplikasi Indeks Persepsi Korupsi
Pengadilan Negeri Brebes mempunyai aplikasi Inovasi Pelayanan Publik berupa aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat, yang dimana aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat ini bisa membantu dalam penilaian kinerja pada Kantor Pengadilan Negeri Brebes.
4. Pembuatan akun Sosmed berupa Facebook, Instagram dan Youtube Pengadilan Negeri Brebes, tujuannya agar mempermudah para pencari keadilan / masyarakat dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat. Tujuannya agar mempermudah para pencari keadilan / masyarakat dalam mendapatkan informasi yang lebih akurat. Serta tanya jawab mengenai pelayanan di Pengadilan. Contohnya Pembuatan Surat Keterangan Tidak pernah dijatuhi hukuman, balik nama, perubahan tanggal lahir, permohonan gugatan, e-court dll yang berhubungan dengan pengadilan.

BAB VI

PENGAWASAN

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas – tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Pengawasan Melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung yaitu terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sedangkan Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I

Pengawasan dilaksanakan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku Aparat Pengadilan, dan kinerja pelayanan publik Pengadilan. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Brebes merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan yang berada di dalam lingkungan Pengadilan Negeri Brebes terhadap pejabat peradilan, keuangan dan material. Ruang Lingkup Pengawasan meliputi penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial peradilan. Sedangkan sasaran pengawasan adalah Aparat Pengadilan Negeri.

Bentuk Pengawasan ada dua yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pemeriksaan. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara melakukan penilaian atas laporan atau isi dokumen. Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pengadilan Negeri meliputi :

- a. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kepaniteraan yang mencakup administrasi persidangan dan administrasi perkara.
- b. Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kesekretariatan yang meliputi administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris barang dan administrasi umum.
- c. Pengawasan terhadap Penanganan Pengaduan yang meliputi pengawasan terhadap tingkah laku Aparat Lembaga Peradilan, Kinerja Lembaga Peradilan dan Kualitas pelayanan publik lembaga peradilan

Upaya untuk melaksanakan pengawasan internal ini salah satunya adalah diadakan pertemuan setiap bulan dengan para Hakim dan seluruh Karyawan serta Karyawati mengevaluasi tugas masing-masing dan hal-hal lain yang dianggap penting juga dibicarakan dalam pertemuan.

6.1. INTERNAL

Disamping itu untuk lebih mengintensifkan fungsi pengawasan telah disusun Hakim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B Nomor : W12.U11/112/KP.04.6/5/2019, tanggal 23April 2019 adalah sebagai berikut :

- Pengawas Bidang Perdata / Humas (Hubungan Masyarakat) SRI SULASTUTI, SH.
- Pengawas Bidang Pidana, Kimwasmat dan Perpustakaan TRI MULYANTO, SH.
- Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan: GALUH RAHMA ESTI, SH., MH
- Pengawas Bidang Hukum: DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH., MH
- Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : NANI PRATIWI, SH

Sesuai Buku I Pedoman Tugas dan Administrasi Pengadilan, pembagian tugas Pengawasan Internal meliputi :

1. Ketua, melakukan pengawasan internal mengenai :
 - a. Ketepatan waktu memulai persidangan.
 - b. Penyusunan court calendar.
 - c. Minutasi harus tepat waktu, terutama terhadap perkara yang diajukan banding dan dalam perkara pidana yang terdakwa berada dalam tahanan.
 - d. Nilai sita jaminan harus seimbang dengan nilai gugatan.
 - e. Dalam menentukan nilai harga lelang agar diperhatikan juga harga umum dan pendapat termohon lelang.
 - f. Tempat pelelangan dilaksanakan harus sama dengan tempat yang diumumkan dalam pengumuman lelang.
 - g. Melakukan pemeriksaan keuangan secara mendadak dan membuat berita acara penutupan kas.
 - h. Mengevaluasi laporan periodik yang menyangkut kegiatan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirim laporan dan hasil evaluasi secara berkala kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
 - i. Mengevaluasi perbuatan dan kegiatan Wakil Ketua, Hakim, seluruh pejabat kepaniteraan dan pejabat structural dan karyawan/karyawati yang dibuat secara berjenjang.

2. Wakil ketua, melakukan pengawasan internal mengenai :
 - a. Perbuatan dan tingkah laku pejabat peradilan termasuk kemampuan teknis administrasi dan realitasnya.
 - b. Pengisian register perkara secara tertib dan terus-menerus.
 - c. Penyampaian isi register oleh Panitera Muda Perdata/ Pidana kepada Panitera Muda Hukum sebagai bahan pembuatan laporan.
 - d. Pembuatan laporan periodik oleh Panitera Muda Hukum.
 - e. Pelaksanaan tugas Jurusita sesuai dengan ketententuan yang berlaku.
 - f. Pembukuan keuangan perkara dibuat secara tertib dan terus-menerus, sesuai dengan ketentuan yang berlaku (ICW dan peraturan pelaksanaannya).
 - g. Setiap pengeluaran biaya untuk kepentingan pemanggilan para pihak, pemberitahuan putusan Hakim dan lain-lainnya, agar benar-benar sampai kepada yang berhak;
 - h. Penyimpanan uang agar disimpan pada Bank Pemerintah dengan rekening yang terpisah antara keuangan perkara dan keuangan APBN.
 - i. Penataan jam kerja yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan tertib perkantoran.
3. Hakim, melakukan pengawasan internal mengenai :
 - a. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi perkara perdata / pidana dan eksekusi yang ditugaskan Pimpinan Pengadilan.
 - b. Khusus dalam pelaksanaan putusan pidana Hakim yang ditugaskan sebagai KIMWASMAT secara periodik mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan.

6.2. EVALUASI

Evaluasi Pengawasan internal dilaksanakan secara berkala melalui forum rapat rutin yang diadakan secara berkala setiap bulanan. Rapat rutin ini terdiri dari rapat Teknis yang dihadiri oleh pejabat fungsional Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B sedangkan untuk rapat dinas dihadiri oleh seluruh pegawai Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B.

Setiap bulan akan diberikan penghargaan kepada Panitera Pengganti yang aktif dalam mengisi data perkaranya melalui aplikasi SIPP dan yang paling cepat dalam menyelesaikan perkara sampai tahap minutasi (minutasi satu hari setelah putusan dibacakan), hal ini diharapkan agar semakin memberi semangat kepada Panitera Pengganti untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara (minutasi)

BAB VII

PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Pada umumnya Pengadilan Negeri Brebes telah melaksanakan tugas dengan baik selama tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ❖ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.
- ❖ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Brebes mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
- ❖ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing – masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik
- ❖ Pengadilan Negeri Brebes berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan.

Dalam melaksanakan tugas selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Brebes mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

Dari urain yang dikemukakan dalam laporan tahunan ini dapat disimpulkan : Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki apabila didukung administrasi yang tertib dan teratur serta adanya Sumber Daya Manusia yang memadai yang didukung oleh Prasarana dan Sarana yang memadai tersebut telah direkomendasikan seperti tersebut di bawah ini.


7.2. REKOMENDASI

Guna mendukung upaya Peningkatan Kinerja pada Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B di tahun mendatang :

1. Perlunya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap Sumber Daya Manusia yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang berkualitas secara berkelanjutan kepada personil Teknis dan Non Teknis guna dihasilkan tenaga yang terampil secara tehnis dan organisatoris, profesional dalam bidangnya.

2. Perlu penambahan Tenaga/ Pegawai sebagai Operator Komputer
3. Untuk mendapatkan perhatian terhadap kondisi Rumah Dinas Jabatan, baik Rumah Dinas Wakil Ketua, maupun Hakim untuk yang 5 Unit Rusak Berat perlu direhab total.
4. Dalam penyusunan RKA-KL tahun 2019 Pengadilan Negeri Brebes masih membutuhkan :
 - ❖ Tersedianya anggaran untuk pembangunan rumah dinas Hakim.
 - ❖ Tersedianya anggaran untuk rehab rumah dinas Hakim sebanyak 5 (lima) unit.
 - ❖ Tersedianya anggaran untuk pengadaan AC Split untuk penyejuk ruangan. Untuk Menunjang administrasi perkara maupun umum.
 - ❖ Tersedianya anggaran untuk meningkat bandwidth internet, hal ini dianggap perlu karena saat ini semua laporan berbasiskan online.
5. Dengan adanya Program dari mahkamah Agung berupa Reformasi Birokrasi terutama mengenai keterbukaan Publik maka untuk mendukung berjalannya aplikasi SIPP dan Direkori Putusan, maka dianggap perlu tersedianya anggaran untuk memenuhi beberapa Perangkat keras sebagai berikut :
 - ❖ Scanner
Untuk Mendukung kelancaran Upload Putusan ke dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung.
 - ❖ Stavolt
Diperlukan untuk mengurangi resiko kerusakan Server karena sering terjadi arus pendek dan lampu mati.
 - ❖ Stabiliser
Diperlukan untuk menjaga kestabilan arus listrik yang diterima oleh Server.
 - ❖ UPS Server
Untuk mengantisipasi listrik yang sering padam sedangkan UPS lama telah rusak.
 - ❖ PC Unit/Thin Client
Untuk menampilkan jadwal sidang di LCD lobi Kantor.
 - ❖ Hotspot
Diperlukan untuk memperlancar pengoperasian CTS, SIMPEG, KOMDANAS, dan SENAYAN.
 - ❖ AC
Diperlukan untuk menjaga suhu ruangan server agar tetap dingin.

Meskipun dengan sarana dan prasarana yang terbatas di Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B, namun pada akhir tahun 2019, Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B telah berhasil merubah peta SIPP dengan presentasi 91.11% pada akhir Desember, hal ini tidak lepas dari



semangat kerja yang ditanamkan seluruh jajaran pegawai Pengadilan Negeri Brebes Kelas I B terutama Hakim dan Panitera Pengganti.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat-NYA dalam Pembangunan di bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Kabupaten Brebes khususnya dan di Indonesia pada umumnya.